

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Subramanyam (2017:20) adalah “Produk dari proses pelaporan keuangan yang diatur dengan standar dan aturan akuntansi, intensif manajer, juga mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan”. Laporan keuangan mewakili kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau periode tertentu. Bahri (2020:187) dalam bukunya menyatakan, “Laporan keuangan merupakan inti dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan digunakan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada perusahaan oleh pemilik perusahaan”.

Laporan keuangan dapat diartikan sebagai sebuah catatan informasi keuangan yang terdapat di suatu perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 Tahun 2018, “Laporan keuangan yang lengkap yaitu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi mengenai penjelasan yang merupakan satu kesatuan dari laporan keuangan”. Selain itu, juga termasuk kelengkapan dokumen yang berisi skedul-skedul atau informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan yang berisi tentang pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah produk dari proses pelaporan keuangan sebagai inti dari transaksi-transaksi dalam tanggung jawab yang diberikan kepada perusahaan. Suatu laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi mengenai penjelasan yang merupakan satu kesatuan dari laporan keuangan.

Di samping itu, laporan keuangan juga digunakan untuk memenuhi tujuan lain sebagai dokumen yang akan disampaikan kepada pihak-pihak luar perusahaan

maupun pihak yang berkepentingan akan laporan keuangan tersebut. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dibutuhkan untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan

Pada setiap akhir periode, perusahaan atau lembaga menyusun laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan menurut Fahmi (2020:2) adalah “Menyediakan informasi keuangan yang terdiri dari unsur-unsur laporan keuangan yang dibuat untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut PSAK No. 1 tahun 2018 tentang penyajian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang dibuat untuk tujuan tersebut melengkapi kebutuhan bersama pengguna laporan keuangan. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum hanya menggambarkan pengaruh keuangan yang terjadi di masa lalu.
3. Laporan keuangan juga menampilkan kegiatan yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) ataupun pertanggungjawaban manajemen atas aset yang dikelolanya.

Setiawan (2021:25) dalam tulisannya menyebutkan, laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi-asumsi dasar, yaitu:

1. Asas dasar akrual
Dengan menggunakan asas ini perusahaan wajib menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akrual, kecuali arus kas. Menurut dasar akrual, pencatatan transaksi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban diakui pada saat transaksi.
2. Asas dasar kas
Dengan menggunakan asas ini perusahaan harus mencatat pendapatan dan biaya hanya saat penerimaan atau pengeluaran kas.
3. Asas kesatuan usaha (Konsep Entitas)
Laporan keuangan digunakan dengan baik oleh perusahaan atau suatu organisasi maupun bagian dari organisasi.
4. Asas kelangsungan usaha

Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan yang diasumsikan akan terus-menerus menjalankan usahanya dan tidak akan dibubarkan sehingga penyajian aset dalam laporan keuangan perusahaan harus berdasarkan harga perolehannya.

5. Asas perbandingan pengeluaran beban dan penghasilan
Pencatatan pengeluaran beban dalam laporan keuangan yang dicatat dalam laporan laba rugi berdasarkan atas hubungan antara biaya yang dikeluarkan dengan penghasilan yang diperoleh. Proses yang disebut *matching concept* ini menghubungkan secara bersamaan atau gabungan antara penghasilan dan beban.
6. Asas harga perolehan
Dengan menggunakan asas ini perusahaan harus mencatat perolehan aset yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan pada saat transaksi.

Bahri (2020:14) menyatakan, “Laporan keuangan adalah hasil dari proses atau siklus akuntansi”. Laporan keuangan mempunyai beberapa jenis berdasarkan masing-masing standar akuntansi, yaitu SAK ETAP dan SAK. Secara umum, terdapat kesamaan dasar ketentuan pada SAK ETAP dan SAK, namun terdapat beberapa perbedaan pada informasi keuangan yang dilaporkan dan nama laporan keuangan. Penamaan laporan keuangan pada SAK ETAP yang berbeda dengan SAK adalah laporan laba rugi dan neraca. Sedangkan, penamaan laporan keuangan pada SAK yang berbeda dengan SAK ETAP adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, dan laporan posisi keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perubahan pada posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan beberapa asumsi dasar yaitu asas dasar akrual, asas dasar kas, asas kesatuan usaha, asas kelangsungan usaha, asas perbandingan pengeluaran beban dan penghasilan, dan asas harga perolehan.

2.2 Koperasi

2.2.1 Definisi Koperasi

Menurut UU No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian koperasi menurut

Djojohadikoesoemo (2013:45), “Koperasi adalah perkumpulan manusia-manusia yang dengan minatnya sendiri ingin bekerja sama untuk memajukan ekonominya”. Tujuan dari didirikannya koperasi adalah menyejahterakan para anggotanya. Koperasi mempunyai modal utama berupa simpanan pokok dan simpanan wajib atau simpanan lain yang berasal dari anggota.

Hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam Pasal 20 UU No. 17 Tahun 2012, yaitu:

1. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Hak anggota koperasi adalah sebagai berikut:
 - a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 - c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 - f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi menggunakan asas kekeluargaan, yaitu koperasi tidak mempunyai tujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi untuk mencapai tujuan bersama. Tidak ada yang dapat menghilangkan hak anggota koperasi, meskipun oleh pengurus koperasi sekalipun. Hak dan kewajiban anggota koperasi akan hilang pada saat anggota tersebut tidak lagi menjadi anggota.

2.2.2 Jenis-Jenis Koperasi

Tercantum pada UU No. 17 Tahun 2012, dua jenis koperasi berdasarkan syarat pembentukannya, yaitu:

1. Koperasi primer

Koperasi dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

2. Koperasi sekunder

Koperasi dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi

Berdasarkan hasil pengamatannya, Hertiyo (2015:13) menyatakan, “Koperasi Indonesia dibedakan pada kebutuhan untuk efisiensi sebuah golongan pada masyarakat yang sejenis karena memiliki aktivitas yang sama dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama”. Koperasi yang bersifat khusus misalnya Koperasi Karet, Koperasi Perumahan, Koperasi Asuransi, dan koperasi lainnya. Untuk kepentingan dan perkembangan lingkungan kerja serta menanggung efisiensi ekonomi koperasi yang menyangkut ketertiban, diperjuangkan hanya satu koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu lingkungan kerja.

Dalam perkembangan di masyarakat, maka jenis koperasi semakin beragam dan mengalami perluasan sesuai dengan pilihan dan kebutuhan masing-masing. Koperasi berdasarkan keanggotaan dan kepentingan ekonomi meliputi koperasi pasar, koperasi sekolah, dan koperasi unit desa. Sedangkan koperasi di Indonesia menurut jenis usaha yang dijalankan yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha (KSU). Meskipun setiap jenis koperasi melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda, namun tetap memiliki tujuan yang sama untuk menyejahterakan anggotanya.

2.3 SAK ETAP

2.3.1 Definisi SAK ETAP

Menurut Ariefiansyah dan Utami (2013:68), “SAK ETAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk entitas dari skala kecil hingga menengah, seperti UKM (tidak memiliki akuntabilitas publik)”. SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) diterbitkan pada 17 Juli 2009 dan mulai berlaku untuk laporan keuangan dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Entitas yang termasuk ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), namun memutuskan untuk menggunakan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) pada tahun 2011 maka entitas tersebut wajib untuk tetap menggunakan SAK dengan konsisten

di periode-periode berikutnya. Entitas yang tidak memenuhi persyaratan ETAP maka entitas harus menggunakan SAK secara konsisten dan tidak diperbolehkan untuk berubah pada SAK ETAP. Penggunaan SAK ETAP hanya dipakai untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang telah memenuhi ketentuan.

Menurut Bahri (2020:25) entitas tanpa akuntabilitas publik adalah:

1. Tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan; dan
2. Mengeluarkan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk pengguna eksternal, seperti pemilik entitas yang tidak berperan langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Bahri (2020:23) menyatakan, “Badan usaha yang termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu perorangan, persekutuan, firma, *commanditaire vennootschap* (CV), perseroan terbatas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan koperasi”. Entitas yang memiliki tanggung jawab publik signifikan, bisa memakai SAK ETAP jika diberi izin oleh regulator. Laporan keuangan yang memenuhi kelengkapan sesuai SAK ETAP Bab 3 Tahun 2019 mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Priharto (2021:78) menyatakan, “SAK ETAP diperuntukkan untuk semua jenis usaha yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan memudahkan manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk jangka pendek maupun panjang, memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, dan lain sebagainya. SAK ETAP disusun secara sederhana sehingga memudahkan bagi pengguna yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas (ETAP) yang secara garis besar adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil sampai menengah.

Menurut Bahri (2020:24) menyatakan, “Prinsip pervasif dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan (KDPPLK) menjadi dasar persyaratan akan pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban pada SAK ETAP”. Prinsip pervasif itu sendiri adalah prinsip yang mewajibkan entitas menggunakan pertimbangan akuntansi yang mengeluarkan

laporan keuangan yang andal dan relevan. Prinsip pervasif ini dibutuhkan untuk membuat pertimbangan akan perlakuan akuntansi atas transaksi yang tidak secara spesifik diatur dalam SAK ETAP, sehingga entitas harus menggunakan pertimbangan yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal.

Sehubungan dengan pencabutan SAK ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), maka Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024 mengeluarkan kebijakan terbaru yang mengatur bahwa koperasi harus segera beralih untuk menerapkan SAK EP (Entitas Privat). Meskipun demikian, penggunaan SAK ETAP pada setiap jenis koperasi sektor riil, koperasi unit simpan pinjam, dan koperasi simpan pinjam masih diperbolehkan hingga akhir tahun buku 2024.

2.3.2 Karakteristik Laporan Keuangan SAK ETAP

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang harus dicapai dalam informasi akuntansi agar tujuannya dapat terpenuhi. Karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap entitas tanpa akuntabilitas publik wajib memenuhi persyaratan yang terdapat dalam SAK ETAP Bab 3 Tahun 2019 sebagai berikut.

1. Dapat dipahami
Pada saat membuat laporan keuangan, informasi akuntansi yang digunakan dan disajikan harus dapat dimengerti dan sesuai dengan istilah yang dapat dimengerti oleh pemakai maupun pihak lain.
2. Relevan
Laporan keuangan harus berisi informasi yang bermanfaat dan berkaitan dengan transaksi. Informasi yang relevan adalah jika informasi tersebut diubah maka keputusan pemakai maupun pihak lain juga akan berubah.
3. Materialitas
Informasi yang disajikan bersifat material. Informasi yang disebut material adalah jika informasi tersebut dirubah, maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan.
4. Keandalan
Informasi pada laporan keuangan dapat dianggap andal jika terbebas dari kesalahan yang material dan bias, juga disajikan secara jujur.
5. Substansi mengungguli bentuk
Informasi diperoleh dan disajikan berdasarkan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
6. Pertimbangan sehat
Melakukan pertimbangan dengan mengedepankan unsur kehati-hatian dalam keadaan ketidakpastian.
7. Kelengkapan

Dalam membuat laporan keuangan, informasi yang dibutuhkan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

8. Dapat dibandingkan

Informasi yang akan menjadi dasar pembuatan laporan keuangan akan lebih bermanfaat dan akurat jika dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan sejenis dalam periode yang sama.

9. Tepat waktu

Informasi yang disediakan harus tepat waktu dan berada dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Entitas harus memahami bahwa manfaat dari informasi juga dapat menjadi manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

Berdasarkan penjelasan di atas, setiap penyusunan laporan keuangan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan banyak melibatkan data-data akuntansi. Sebuah laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memiliki data-data akuntansi sesuai dengan karakteristik kualitatif menurut SAK ETAP. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah acuan dalam mencatat data-data akuntansi untuk membuat laporan keuangan perusahaan.

2.4 Pendapatan

2.4.1 Definisi Pendapatan

Dalam laporan laba rugi, pendapatan menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Pendapatan menjadi salah satu tolak ukur dalam penentuan besar kecilnya laba (keuntungan) maupun kerugian yang didapatkan dari proses kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Pada dasarnya, laba dapat digunakan sebagai penentu besarnya pembagian sisa hasil usaha suatu koperasi, besarnya pajak yang disetorkan, sebagai komponen perhitungan hasil usaha, serta menjadi alat pengukur suatu kinerja kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan bahwa pendapatan sebagai penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, royalti,

dan pendapatan sewa.

Hery (2021: 46) mendefinisikan “Pendapatan merupakan suatu arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang menjadi suatu kegiatan utama atau pusat suatu perusahaan”. Sehubungan dengan keputusan amandemen PSAK 23 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, maka PSAK 72 Tentang Pendapatan Kontrak dengan Pelanggan berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2020. Pengertian pendapatan secara rinci tidak terdapat dalam PSAK 72 tahun 2019, pendapatan (*revenue*) hanya dijelaskan sebagai penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal entitas.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal, muncul dalam pelaksanaan kegiatan operasi atau usaha dari suatu entitas yang biasa dan dikenal dengan berbagai sebutan seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

2.4.2 Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan dalam SAK ETAP Bab 20 Tahun 2019 mengatur penerapan akuntansi untuk pendapatan yang muncul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian berikut:

1. Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali);
2. Pemberian jasa;
3. Kontrak konstruksi;
4. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, atau dividen.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, suatu koperasi harus mengklasifikasikan pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan tetapi belum dapat diterima.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, suatu pendapatan akibat transaksi atau kejadian tertentu dapat diakui menjadi pendapatan yang masih harus diterima apabila pendapatan tersebut sudah dapat diakui namun belum dapat diterima.

2.4.3 Perlakuan Pendapatan

Perlakuan akuntansi dalam menyusun pos pendapatan berdasarkan SAK ETAP Bab 20 Tahun 2019 terdiri dari tiga proses yaitu pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan.

2.4.3.1 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan harus diakui secara tepat dan benar oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam transaksi pendapatan, pengakuan pendapatan menjadi suatu yang sangat penting. Pengakuan pendapatan menjadi suatu dasar dalam perhitungan pendapatan dapat lebih besar maupun lebih kecil dalam periode tertentu, sehingga laporan laba rugi dapat mencerminkan pendapatan yang didapatkan oleh entitas yang sesungguhnya.

Pendapatan diakui jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset ataupun penurunan kewajiban telah terjadi dan hal tersebut dapat diukur secara andal. Ketentuan terkait pengakuan pendapatan dibedakan berdasarkan jenis pendapatan seperti pendapatan dari penjualan barang, pendapatan dari penjualan jasa, serta pendapatan dari bunga, royalti, dan dividen.

Berikut pengakuan pendapatan menurut SAK ETAP Bab 20 Tahun 2019 pada jenis-jenis kegiatan:

1. Pengakuan pendapatan pada penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui apabila seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- a. Risiko dan manfaat dari kepemilikan barang kepada pembeli telah dipindahkan oleh entitas.

Kepastian bahwa risiko dan manfaat kepemilikan barang yang signifikan telah berpindah kepada pembeli, suatu entitas harus melakukan pengujian pada keadaan transaksi yang terjadi. Pada umumnya, perpindahan terjadi bersamaan dengan perpindahan hak milik barang tersebut pada pembeli. Perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan barang tanpa adanya perpindahan hak milik barang pada pembeli juga terkadang dapat terjadi.

- b. Tidak lagi meneruskan pengelolaan yang biasanya yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang atau mengendalikan secara efektif atas barang yang dijual oleh entitas.

Ketika barang belum di jual, suatu entitas melakukan pengendalian secara efektif. Suatu entitas berhenti untuk melakukan pengendalian ketika barang tersebut telah dijual, dan entitas dapat mengakui pendapatan atas transaksi yang terjadi.

c. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

Suatu entitas dapat mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Jika suatu pendapatan tidak dapat diukur secara andal, suatu entitas tidak dapat mengakui pendapatan tersebut.

d. Manfaat ekonomi terkait transaksi tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke entitas.

Pendapatan diakui ketika manfaat ekonomi terkait transaksi tersebut memiliki kemungkinan yang besar mengalir kepada entitas. Kemungkinan tersebut baru dicapai ketika imbalan telah diterima ataupun ketidakpastian dihilangkan.

e. Biaya yang timbul atau akan timbul yang berhubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara andal.

Pengukuran terhadap biaya tersebut harus dapat diukur secara andal. Jika biaya yang berhubungan dengan transaksi tersebut tidak dapat diukur secara andal, maka suatu entitas tidak dapat mengakui pendapatan dari transaksi tersebut. Dalam hal ini, setiap imbalan yang diterima untuk penjualan barang diakui sebagai kewajiban.

2. Pengakuan pendapatan pada penjualan jasa.

Apabila sebuah hasil transaksi yang berkaitan dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, pendapatan yang berhubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengikuti acuan tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Suatu hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut dapat dipenuhi:

a. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

Suatu entitas dapat mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Jika suatu pendapatan tidak dapat diukur secara andal, suatu entitas tidak dapat mengakui pendapatan tersebut.

b. Manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke entitas.

Pengakuan pendapatan dilakukan ketika manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi tersebut memiliki kemungkinan besar akan mengalir ke entitas. Apabila terjadi suatu ketidakpastian dalam penagihan, jumlah yang tidak tertagih harus diakui menjadi beban, tidak sebagai pengurang pendapatan yang diakui sebelumnya.

c. Pada akhir periode pelaporan, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dapat diukur secara andal.

Terdapat beberapa metode untuk menghitung tingkat penyelesaian dari suatu transaksi. Hal ini tergantung pada sifat dari suatu transaksi tersebut, metode yang digunakan mencakup:

1) Survei pekerjaan yang sudah dikerjakan atau diselesaikan.

- 2) Jasa yang diberikan hingga tanggal tertentu yang dihitung sebagai persentase dari total jasa yang dilakukan, atau
 - 3) Proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut.
- d. Biaya yang keluar untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara andal.
- Pengakuan pendapatan pada jasa harus diakui ketika manfaat ekonomi dari transaksi yang berhubungan memiliki kemungkinan besar mengalir ke entitas. Pada umumnya, suatu entitas seringkali tidak dapat melakukan estimasi secara andal terhadap penjualan jasa, sehingga pendapatan dapat diakui hanya yang berkaitan dengan biaya yang telah terjadi yang dapat dipulihkan. Akan tetapi, apabila suatu entitas tidak dapat melakukan estimasi secara andal dan kemungkinan biaya yang dipulihkan itu kecil, pendapatan tidak dapat diakui dan biaya tersebut diakui sebagai beban.
3. Pengakuan pendapatan pada bunga, royalti dan dividen.
- Pendapatan yang berasal dari bunga, royalti, dan dividen pada dasarnya diakui secara metode akrual, di mana pendapatan diakui ketika transaksi tersebut terjadi. Suatu entitas harus mengakui pendapatan pada bunga, royalti, dan dividen dengan dasar sebagai berikut:
- a. Pendapatan pada bunga diakui secara akrual;
 - b. Pendapatan pada royalti diakui dengan dasar akrual tergantung dengan substansi dari perjanjian; dan
 - c. Pendapatan pada dividen diakui saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi.
- Pengakuan pendapatan pada bunga, royalti, dan dividen diakui berdasarkan ketentuan di atas ketika:
- a. Manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi bunga, royalti, dan dividen adanya kemungkinan akan mengalir pada entitas; dan
 - b. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

Kieso *et. al* (2018:236) menyatakan bahwa pendapatan diakui berdasarkan sifat dan jenis transaksi, sebagai berikut:

1. Suatu entitas mengakui adanya pendapatan dari sebuah penjualan barang pada saat tanggal penjualan barang tersebut;
2. Suatu entitas mengakui adanya pendapatan pada pemberian suatu jasa di mana jasa tersebut telah dilakukan dan dapat dilakukan penagihan;
3. Suatu entitas mengakui adanya pendapatan dari penggunaan aktiva entitas oleh pihak lain seperti bunga, royalti, sewa, ketika aktiva tersebut telah selesai digunakan atau saat aktiva tersebut masih dalam penggunaan oleh pihak lain;
4. Suatu entitas dapat mengakui pendapatan dari penjualan aset yang sudah tidak digunakan pada saat tanggal terjadinya penjualan.

Terdapat dua basis pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi sebagaimana diungkapkan oleh Warren *et. al* (2019:110), yaitu:

1. Basis AkruaI

Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan diakui ketika jasa telah dilakukan atau barang telah diberikan kepada pelanggan.

2. Basis Kas

Pada akuntansi berbasis kas, pendapatan diakui ketika kas atau setara kas telah diterima dari pelanggan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengakuan terhadap pos pendapatan meliputi aktivitas dan transaksi pada penjualan barang, penjualan jasa, serta bunga, royalti, dan dividen. Setiap risiko, manfaat, jumlah pendapatan, dan biaya yang terjadi harus dapat dikur secara andal. Selain itu, harus terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas.

Dalam mengakui suatu pendapatan, terdapat dua basis; akrual dan kas yaitu masing-masing digunakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas pendapatan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada saat melakukan pencatatan dengan menggunakan basis akrual, dalam jurnal penyesuaian, meskipun kas belum diterima atas transaksi yang telah dilakukan, entitas harus terlebih dahulu mengakui pendapatan yang harus diterima sebagai akun yang bertambah di sisi debit dan dipasangkan dengan akun pendapatan sesuai jenis kegiatan.

**Tabel 2.1 Jurnal Pengakuan Pendapatan Yang Harus Diterima
(dalam Rupiah)**

JURNAL			
Tgl.	Nama Akun	Debit	Kredit
31 Des. 20XX	Pendapatan Yang Harus Diterima	xxx	
	Pendapatan Penjualan/Jasa/Bunga, Royalti, Dividen		xxx

Sumber: SAK ETAP Bab 20 Tahun 2019

Berdasarkan jurnal penyesuaian tersebut, maka Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dapat melakukan pencatatan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Jurnal Pengakuan Pendapatan Bunga
(dalam Rupiah)**

JURNAL			
Tgl.	Nama Akun	Debit	Kredit
31 Des. 20XX	Pendapatan Bunga	xxx	
	Pendapatan Jasa Simpan Pinjam		xxx

Sumber: Diolah dari SAK ETAP Bab 20 Tahun 2019

Pada tahap selanjutnya, apabila terjadi transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas, maka entitas akan mengkreditkan/menghapus akun pendapatan yang harus diterima. Kemudian di sisi kredit turut disertai akun pendapatan sesuai jenis kegiatan dan akun pelengkap lainnya jika diperlukan.

**Tabel 2.3 Jurnal Penerimaan Kas
(dalam Rupiah)**

JURNAL			
Tgl.	Nama Akun	Debit	Kredit
xx Bulan 20XX	Kas	xxx	
	Pendapatan Penjualan/Jasa/Bunga, Royalti, Dividen		xxx
	Akun pelengkap		xxx

Sumber: SAK ETAP Bab 20 Tahun 2019

Berdasarkan jurnal penyesuaian tersebut, maka Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dapat melakukan pencatatan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jurnal Penerimaan Pendapatan Bunga dan Keterlambatan Angsuran (dalam Rupiah)

JURNAL			
Tgl.	Nama Akun	Debit	Kredit
xx Bulan 20XX	Kas	xxx	
	Angsuran Pinjaman		xxx
	Bunga Pinjaman		xxx
	Denda Keterlambatan		xxx

Sumber: Diolah dari SAK ETAP Bab 20 Tahun 2019

2.4.3.2 Pengukuran Pendapatan

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, perusahaan menginginkan laba sebesar-besarnya. Laba yang diperoleh perusahaan berasal dari perhitungan selisih lebih dari jumlah pendapatan dengan jumlah beban dalam suatu periode. Dalam perhitungan tersebut, agar mendapatkan suatu laba, maka jumlah pendapatan harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah beban.

Ketentuan dalam SAK ETAP Bab 20 Tahun 2019 telah mengungkapkan pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima dengan jumlah diskon dalam penjualan dan potongan volume tidak dimasukkan dalam nilai wajar tersebut. Selain itu, pendapatan akan manfaat ekonomi yang diterima maupun yang harus diterima harus dimasukkan secara bruto. Kemudian, sejumlah nilai yang menjadi bagian dari pihak ketiga harus dikeluarkan dari pendapatan seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan dalam hubungan keagenan, entitas mengukur suatu pendapatan sebesar jumlah komisi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam melakukan pengukuran terhadap pos pendapatan suatu entitas dilakukan berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan diskon dan berbagai pajak atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima, serta sebesar jumlah komisi jika dalam hubungan keagenan.

2.4.3.3 Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan

Tahapan terakhir dari suatu siklus akuntansi merupakan penyajian laporan keuangan. Siklus akuntansi yang bermula dari pencatatan suatu transaksi,

pemindahan jurnal ke buku besar, dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan di bagian akhir dalam satu periode. Penyajian laporan keuangan menunjukkan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara kapan dan bagaimana aktivitas tersebut. Dapat dikatakan efektif suatu pelaporan keuangan pada saat laporan keuangan dapat menunjukkan atau memberikan informasi secara relevan, lengkap, tepat waktu, serta dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut.

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan sebagai dasar oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan. Hal ini menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas. Selain itu, laporan keuangan juga membantu pihak berkepentingan seperti investor, kreditor, pelanggan, dan lainnya dalam menentukan kondisi keuangan perusahaan maupun gambaran kondisi arus kas di masa yang akan datang.

Menurut SAK ETAP Bab 20 Tahun 2019, pendapatan disajikan dalam laporan laba rugi. Pendapatan menjadi salah satu bagian penting dalam laporan laba rugi, di mana menghasilkan laba atau rugi suatu perusahaan. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan yang dikurangi jumlah beban operasional di mana akan menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional. Laba bersih dari kegiatan operasional ditambahkan dengan pendapatan lain-lain dan dikurangkan dengan beban lain-lain perusahaan yang kemudian menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan. Laba bersih dari sebuah perusahaan dihasilkan melalui laba sebelum pajak penghasilan dikurangkan dengan pajak penghasilan.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, bahwa pengungkapan adalah dasar pembentukan suatu pos sehingga dapat disertakan dalam neraca; nama maupun angka.

Pengungkapan pendapatan yang dilakukan oleh suatu entitas berdasarkan SAK ETAP Bab 20 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas sebagai dasar dalam pengakuan pendapatan, termasuk di dalamnya metode yang diterapkan dalam penentuan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa.
2. Entitas juga mengungkapkan jumlah tiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk dengan pendapatan yang timbul dari penjualan barang, penyediaan jasa, bunga, royalti, dividen, dan jenis pendapatan signifikan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyajian dan pengungkapan pendapatan oleh suatu entitas tanpa akuntabilitas publik tercantum pada laporan laba rugi. Pendapatan disajikan sebagai pengurang atas jumlah beban operasional, untuk tahap berikutnya pada jenis pendapatan lain-lain diolah lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan laba sebelum pajak. Pengungkapan pendapatan oleh entitas tersebut harus memuat kebijakan akuntansi yang digunakan dan jumlah tiap kategori pendapatan yang diakui selama periode bersangkutan.